

Transparansi Seleksi CPNS Di Indonesia: Realita, Tantangan, Dan Implikasinya – Kajian Literatur

Novia Rosa¹, Aditiawarman², Rina Yuliani³, Mardianti⁴, Zulham⁵, Zul Fahmi⁶

Ilmu Administrasi Negara, STIA Bina Nusantara Mandiri, Pariaman

Email: noviarosa@gmail.com¹, laskarmoejahied@gmail.com², rinayuliani.a@gmail.com³, diantimar86@gmail.com⁴, zulham@gmail.com⁵, 18zulfahmi@gmail.com⁶

Abstract. *This study aims to examine the implementation of the principle of transparency in the recruitment process of Civil Servant Candidates (CPNS) across various regions in Indonesia, using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The SLR method is employed to collect, select, and analyze a range of academic sources and relevant documents from journal databases and reputable online repositories. The stages of this research include identifying keywords, searching for articles based on inclusion and exclusion criteria, assessing the quality of the sources, and synthesizing the findings to identify key patterns and insights regarding indicators and obstacles in the application of transparency. The findings reveal that the implementation of transparency principles is generally in accordance with regulations and contributes positively to participants' perceptions of the selection process. However, several challenges remain, such as limited access to information and complex bureaucratic procedures, which require further attention. Optimal implementation of transparency is believed to enhance public trust and improve the quality of public services. This study recommends the need to strengthen public outreach and the utilization of technology, such as digital platforms and official websites, as effective channels for delivering comprehensive and up-to-date information, as well as for providing accessible registration forms for participants from diverse social backgrounds.*

Keyword: *Transparency, Civil Servant Recruitment, Good Governance, Accountability, Public Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai daerah di Indonesia. melalui pendekatan Literature Systematic Review (LSR). Metode LSR digunakan untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis berbagai sumber akademik dan dokumen terkait dari basis data jurnal dan repository online yang relevan. Tahapan dalam penelitian ini meliputi pengidentifikasian kata kunci, pencarian artikel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas sumber, serta sintesis hasil penelitian untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama mengenai indikator dan hambatan dalam penerapan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi secara umum telah sesuai dengan aturan dan memberikan gambaran positif terhadap persepsi peserta terhadap proses seleksi. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan akses informasi dan birokrasi yang kompleks yang membutuhkan perhatian lebih. Implementasi prinsip transparansi yang optimal diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan penggunaan teknologi seperti Platform Digital dan Website Resmi yang bertujuan sebagai media penyampaian informasi lengkap, terbaru, serta formulir pendaftaran yang mudah diakses oleh seluruh peserta dari berbagai latar belakang masyarakat

Kata Kunci: *Transparansi, Rekrutmen CPNS, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi Publik*

Received mei 20, 2025; Revised may 28, 2025; Accepted Jun 15, 2025

*Zul Fahmi, e-mail address: 18zulfahmi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan terpercaya, reformasi birokrasi menjadi agenda utama pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu aspek strategis dalam mendukung reformasi ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang merupakan pintu masuk utama bagi aparatur negara. Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai, yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas (Krina, 2003). Dalam konteks pelayanan publik, transparansi mencakup kemudahan akses informasi, kejelasan prosedur, serta penyediaan data yang lengkap dan relevan (Ratminto & Winarsih, 2005). Kim (2007) menambahkan bahwa transparansi juga meliputi unsur kejelasan, aksesibilitas, integrasi informasi, dan rasionalitas dalam proses administrasi. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pentingnya tanggung jawab institusi publik terhadap kinerja dan hasil kebijakannya. Dalam konteks birokrasi, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugasnya kepada publik secara transparan dan dapat diukur (Sedarmayanti, 2012; Sirajudin et al., 2012). Akuntabilitas menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi karena memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan masyarakat.

Dalam proses rekrutmen CPNS, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai diperkuat melalui strategi digitalisasi, salah satunya dengan penggunaan *Computer Assisted Test (CAT)*. Metode ini dikembangkan untuk meningkatkan objektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam seleksi, sekaligus menekan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut laporan resmi Kementerian PAN-RB, sistem seleksi berbasis CAT telah membuka akses informasi yang lebih luas, mempercepat pengumuman hasil, serta mengurangi intervensi pihak luar (www.menpan.go.id). Hal ini memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap integritas dan legitimasi proses rekrutmen CPNS. Namun demikian, penerapan prinsip ini belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta tidak meratanya akses terhadap informasi publik. Studi terdahulu menyoroti bahwa sistem seleksi yang tidak transparan dan terlalu birokratis justru memperkuat potensi terjadinya KKN sejak tahap awal rekrutmen (Kusharwanti, 2008; Setyowati, 2009). Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam memastikan integritas seleksi.

Keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen aktor birokrasi serta budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan pertanggungjawaban. Sosialisasi kebijakan, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses evaluasi menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, praktik seleksi CPNS yang transparan dan akuntabel diyakini akan menghasilkan aparatur yang profesional dan berintegritas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip ini melalui pendekatan yang

sistematis dan berbasis bukti. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses rekrutmen CPNS di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat memperkuat pelaksanaannya di masa mendatang.

Kondisi demikian dinilai penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip ini melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dalam proses rekrutmen CPNS di berbagai daerah di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi indikator keberhasilan, persepsi publik, dan hambatan struktural maupun teknis yang masih dihadapi dalam praktiknya. Secara khusus, studi ini menggunakan pendekatan Literature Systematic Review (LSR) untuk menghimpun dan menganalisis temuan dari berbagai publikasi ilmiah, laporan resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) sejauh mana keterbukaan informasi diterapkan dalam setiap tahap seleksi, (2) bagaimana teknologi seperti Computer Assisted Test (CAT) berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta (3) faktor-faktor penghambat dan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola rekrutmen CPNS di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *Literature Review Study* adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai hasil penelitian maupun sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik tertentu. Tujuan utama dari *Literature Review Study* adalah untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai sumber-sumber yang ada, memahami perkembangan pemikiran, konsep, dan temuan terkait topik yang dikaji, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Metode ini biasanya digunakan sebagai dasar teoritis, penguatan argumentasi, dan untuk menyusun kerangka konseptual dalam suatu studi ilmiah. Dengan kata lain, *Literature Review Study* berfungsi untuk meninjau secara sistematis dan kritis literatur yang ada agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan valid mengenai isu yang sedang dikaji. Menurut (Cahyono et al., 2019) Tinjauan literatur adalah pendekatan ilmiah yang memberikan gambaran tentang evolusi suatu subjek tertentu yang digunakan dalam penelitian dan berfokus pada masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, digunakan metode Literatur Review (LR) sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan serta menganalisis data terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen CPNS. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode LR ini secara sistematis mengikuti langkah-langkah ilmiah yang telah diakui secara akademik diantaranya :

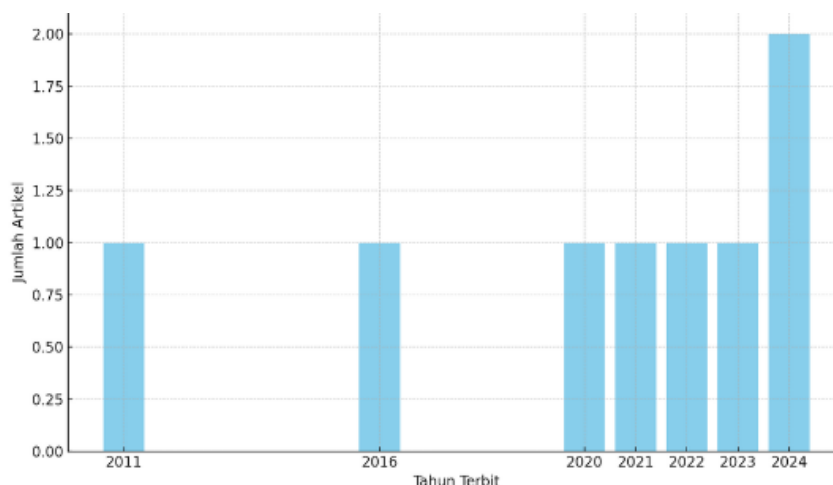
1. Pertama, peneliti menentukan tujuan utama dari penelitian ini, yaitu untuk memahami dan mengevaluasi penerapan prinsip transparansi melalui berbagai studi dan literatur terkait. Selanjutnya, peneliti mengungkap isi utama dari setiap sumber dengan cara membaca secara mendalam, menyoroti poin penting, serta mengidentifikasi konsep, temuan, dan rekomendasi yang relevan, menurut Windy Andriani (2021) sistem literatur review yang digunakan memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan. Penulis mencari data atau bahan literatur dari jurnal atau artikel penelitian terdahulu berdasarkan research question

penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. Research Questions

<i>Research Questions</i>	Tujuan
Bagaimana penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Seleksi CPNS	Untuk mengungkap prinsip transparansi dan akuntabilitas proses seleksi CPNS yang telah terlaksana.
Bagaimana dimensi-dimensi transparansi yang dievaluasi dan tantangan yang dihadapi	Untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi penting transparansi yang dievaluasi dan tantangan seleksi CPNS
Bagaimana dampak penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen CPNS	Untuk mengidentifikasi dampak penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen CPNS

2. Setelah isi dari literatur ditemukan dan dipahami, langkah berikutnya riset ini adalah pencarian artikel yang relevan dengan menggunakan kata kunci khusus di basis data Google Scholar. Kata kunci yang digunakan disusun secara spesifik untuk memastikan mendapatkan sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan dari jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dan terbaru yang membahas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi pegawai negeri sipil, antara lain: Artikel dengan judul “Opini Peserta terhadap Transparansi” atau Artikel “Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemeriksaan CPNS” serta Artikel terkait “pengaruh penerapan prinsip hukum dan layanan publik dalam proses rekrutmen”. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang telah disebutkan, dengan langkah-langkah:
 - a) Mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel dari database jurnal dan repository online. Membaca dan memahami isi setiap artikel terkait indikator dan indikator kualitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menyusun data hasil penelitian yang relevan dan sinkronisasi antar sumber. Artikel yang dikumpulkan bersumber dari berbagai jurnal dengan detail than terbit sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram artikel yang disintesa

- b) Peneliti melakukan tabelisasi atau mentabulasi hasil dari setiap artikel, berisi informasi yang dibutuhkan dalam review. Proses ini penting untuk memudahkan analisis sintesis dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Setelah terstruktur, dilakukan review terhadap setiap artikel secara kritis; termasuk menilai kelebihan, kelemahan, dan kontribusi masing-masing sumber terhadap topik penelitian. Dari proses review ini, peneliti kemudian dapat mengidentifikasi pola, tren, serta kesenjangan dalam literatur terkait. Adapaun tabelisasi artikel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II. Daftar artikel yang direview

No	Judul Riset	Penulis	Tahun Terbit	Jurnal Publikasi	Hasil Utama/Temuan
1	Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan CPNS	Dingga Aldhy Mahendra, Henny Juliani	2022	Administrative Law & Governance Journal	Transparansi & akuntabilitas cukup baik di BKPSDM Semarang, namun masih ada hambatan seperti kurangnya sosialisasi & akses informasi.
2	Penerapan Prinsip Kesetaraan, Efektivitas, Efisiensi & Aturan Hukum dalam Rekrutmen PNS NTB	Dhea Candra Dewi, Vidya Yanti Utami, Subandi Pariyatma	2023	Ilmu Politik dan Pemerintahan	Proses seleksi adil, efisien, sesuai hukum; berdampak positif terhadap layanan publik dan perlu kajian lebih lanjut.
3	Transparansi Rekrutmen CPNS di BKPSDM Sumedang	Didi Supriadi	2020	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proses transparan dengan prosedur mudah dipahami, tapi masih ada kendala dalam pelatihan & partisipasi publik.
4	Opini Peserta terhadap Transparansi Seleksi CPNS dengan Metode CAT (Sulbar)	Ansyah Syam, Tuti Bahfiarti	2016	Jurnal Komunikasi KAREBA	Peserta menilai proses transparan, terutama dalam keterbukaan dan ketersediaan informasi; dimensi pemahaman masih perlu diperbaiki.

5	Transparansi Rekrutmen PPPK di Kabupaten Muna Barat	Suriyani BB, Asriani, La Ode M. Elwan, Risky W. Yanti	2024	Journal Publicuho	Transparansi belum maksimal, informasi belum jelas, mekanisme pengaduan & akses informasi masih lemah.
6	Opini Peserta terhadap Transparansi CPNS melalui CAT	Sulaiman & Dody Radiansah	2021	Jurnal Eksos	Transparansi sangat baik; CAT dinilai meningkatkan kepercayaan peserta melalui keterbukaan & kemudahan informasi.
7	Implikasi Moratorium Penerimaan CPNS terhadap Reformasi Birokrasi	Dewi S. Dharmaningtias	2011	Politica	Moratorium dorong evaluasi SDM, penghematan anggaran & reformasi birokrasi, tapi perlu reformasi menyeluruh.
8	Efektivitas Sistem CAT dalam Seleksi CPNS di UPT BKN Padang	Ade Maharani, Risky H. Adibarata, Tosa Anggara, Yulia Hanoselina	2024	Jurnal Ilmu Manajemen Bisnis dan Ekonomi	CAT efektif, transparan, mengurangi KKN, meningkatkan kepercayaan publik, efisien dalam waktu & biaya.

Sumber : Berbagai publikasi terdahulu

- c. Dalam metode penelitian *systematic literature review* menurut (Perry & Hammond 2002) para peneliti mencari referensi jurnal ilmiah maupun bahan penelitian lain yang dapat dijadikan acuan maupun landasan teori bagi penelitian yang baru yang mana ketika sudah mendapatkan bahan atau pedoman dari adanya referensi oleh peneliti yang lain. Dalam review ini terdapat 8 artikel yang disintesis dan pelajari secara mendalam guna mengungkap tujuan riset ini seperti yang terinci pada tabel 1.
- d. Terakhir, berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan merekomendasikan implikasi kebijakan atau penelitian selanjutnya. Kesimpulan ini mencerminkan seluruh rangkaian proses, baik dari identifikasi isu, analisa mendalam, maupun sintesis dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif dan ilmiah tentang topik yang dikaji. Dengan tahapan ini, metode literatur review memastikan bahwa penelitian didasarkan pada data sekunder yang valid, sistematis, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen CPNS merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan terpercaya. Melalui sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan proses seleksi dapat berlangsung secara objektif dan adil, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penerapan prinsip ini juga menjadi pondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan rekrutmen CPNS menjadi keharusan untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan, adapun beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah:

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Seleksi CPNS

Berdasarkan rangkaian studi dan artikel yang telah dikumpulkan dan dianalisis, secara umum, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) menunjukkan trend positif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa upaya pemerintah dan badan kepegawaian daerah telah memperhatikan aspek transparansi sebagai bagian integral dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di BKPSDM Kabupaten Semarang telah berjalan cukup baik (Dingga A. Mahendra & Henny J, 2022), Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, transparansi dalam proses seleksi menjamin hak warga negara memperoleh informasi terkait ketersediaan formasi, persyaratan, dan prosedur yang harus diikuti. Sementara itu, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap tahapan dan keputusan dalam proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Meski demikian, beberapa hambatan yang menyebabkan penerapan prinsip tersebut belum optimal. Faktor manusia mencakup kesulitan pelamar dalam memenuhi kualifikasi pendidikan dan gelar yang beragam, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi pelamar. Faktor sistem meliputi gangguan pada website saat masa pendaftaran dan fasilitas komputer yang kurang memadai untuk mendukung sistem CAT, sehingga menghambat kelancaran proses dan layanan informasi yang cepat. Hambatan-hambatan ini sangat signifikan, karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi, yang pada akhirnya mempengaruhi citra pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Berpengaruhnya faktor penghambat ini terhadap kepercayaan publik sangat penting untuk diperhatikan. Ketidakstabilan sistem dan lambatnya respon BKPSDM dalam menanggapi pertanyaan masyarakat menyebabkan persepsi bahwa proses penerimaan tidak sepenuhnya transparan dan terbuka. Padahal, menurut artikel terdahulu, transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal memberikan layanan yang ramah dan responsif tetapi masih belum maksimal. Mereka menegaskan bahwa perlunya transparansi yang lebih terbuka dalam pengumuman formasi, syarat, dan prosedur pelaksanaan seleksi.

Sementara hasil penelitian (Anysyah S & Tuti B, 2016) menunjukkan bahwa opini peserta terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi CPNS melalui metode CAT di Sulawesi Barat secara umum juga berada dalam kategori baik, bahkan mendekati sangat baik, pada seluruh dimensi yang dinilai. Terkait pendapat peserta, hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikator keterbukaan informasi, kemudahan dimengerti, dan ketersediaan informasi mendapat penilaian positif. Rata-rata skor opini peserta berada dalam kategori baik sampai sangat baik, dengan persentase keberhasilan mencapai lebih dari 78%–84%. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi, informasi, dan transparansi serta aspek-aspek penting dalam seleksi CPNS sudah cukup baik dan mampu memenuhi harapan peserta.

Namun demikian, bahwa pentingnya peningkatan dalam aspek kemudahan memahami informasi, karena kadang-kadang peserta mengalami kesulitan memahami instruksi dan prosedur yang disampaikan. Untuk itu, selain menyediakan informasi secara lengkap, harus ada inovasi dalam menyampaikan informasi tersebut agar semakin mudah dipahami oleh berbagai kalangan peserta, meskipun pelaksanaan prinsip transparansi sudah diupayakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih belum maksimal. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari BKPSDM dengan

memperbaiki sistem penyebaran informasi, memperkuat kerja sama dengan media dan lembaga non-pemerintah, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai rekrutmen peserta (Suriyani BB & rekan 2024).

Dimensi-Dimensi Transparansi yang Dievaluasi dan Tantangan yang Dihadapi

Penerapan prinsip transparansi dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Semarang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi beberapa dimensi transparansi sebagaimana dijelaskan dalam literatur akademik. Dimensi-dimensi tersebut antara lain mencakup prosedur yang terbuka, kemudahan akses terhadap informasi, serta tersedianya mekanisme pengaduan dan klarifikasi dari masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Semarang telah menyediakan media resmi, seperti situs web dan kanal YouTube, untuk menyampaikan informasi terkait pengumuman, persyaratan pendaftaran, serta hasil seleksi CPNS. Hal ini menunjukkan adanya penerapan dimensi prosedur terbuka dan akses informasi secara digital.

Namun demikian, efektivitas implementasi dimensi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Gangguan sistem serta keterbatasan sarana komputerisasi menghambat keterjangkauan informasi secara luas, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi secara langsung dan tepat waktu. Berdasarkan temuan dalam artikel-artikel terdahulu, terdapat dua tantangan utama yang menghambat optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi CPNS. Pertama, tantangan teknologi, berupa ketidakstabilan sistem situs web dan keterbatasan perangkat keras, menjadi faktor penghambat utama dalam menjamin keterbukaan informasi yang merata. Kedua, tantangan dari aspek sumber daya manusia, seperti ketidakjelasan alur prosedur, minimnya kegiatan sosialisasi, serta disparitas tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, turut memperumit proses pengawasan publik serta menghambat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang berlaku. Ketidakkonsistenan dalam penyediaan informasi maupun keterlambatan dalam penyampaian data dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap transparansi proses rekrutmen. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mereduksi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam mewujudkan sistem rekrutmen yang transparan, inklusif, dan akuntabel (Dingga A. Mahendra & Henny J, 2022).

Dari segi dimensi-dimensi transparansi yang dievaluasi berdasarkan indikator Krina (2003), terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi standar ideal. Pertama, penyediaan informasi yang jelas dan lengkap tentang tanggung jawab dan proses rekrutmen masih belum maksimal karena website resmi yang digunakan tidak berfungsi optimal dan media sosial yang tercantum tidak dimanfaatkan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi penyediaan informasi, yang merupakan salah satu pilar utama transparansi, perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan agar masyarakat dapat mengikuti proses secara lengkap dan tepat waktu. Jika mekanisme pengaduan ini tidak diperkuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen akan terus tergerus (Suriyani BB & rekan 2024).

Selain itu, tantangan utama lainnya adalah dalam hal kemudahan akses informasi. Meskipun sistem penyediaan informasi melalui website dan media sosial telah dilakukan, kenyataannya respons yang terlambat dan informasi yang tidak selalu update menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan dari masyarakat. Kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi, tetapi tantangan mengenai literasi digital dan infrastruktur komunikasi harus segera diatasi

Adapun dimensi utama transparansi yang dievaluasi dalam literatur ini meliputi keterbukaan informasi, ketersediaan informasi, dan kemudahan pemahaman. Penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut secara umum mendapatkan penilaian positif. Dimensi keterbukaan, yang terkait dengan penyampaian informasi secara jelas dan terbuka, dinilai sangat baik oleh peserta, menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan cukup efektif.

Ketersediaan informasi, meskipun juga berperan penting, masih memiliki kelemahan dari segi aksesibilitas. Beberapa studi menegaskan bahwa meskipun informasi sudah disampaikan secara lengkap, namun akses terhadap informasi tertentu masih belum optimal, misalnya terkait prosedur verifikasi peserta dan pengumuman hasil. Hal ini menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa seluruh peserta mendapatkan informasi secara merata dan tidak merasa dirugikan. Sementara itu, aspek kemudahan memahami informasi juga sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang merasa informasi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti cenderung memiliki opini yang lebih positif terhadap proses seleksi. Oleh karena itu, inovasi dalam penyampaian informasi seperti penggunaan infografis, video, dan platform digital interaktif dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan aspek ini.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah skeptisisme dan persepsi terhadap keadilan proses, yang muncul di awal-awal penerapan metode CAT (Computer Assisted Test). Responden dari berbagai studi menyatakan bahwa ada kekhawatiran akan ketidakadilan dari segi teknis dan kemungkinan kecurangan. Meski demikian, penggunaan teknologi seperti live streaming dan pengawasan secara elektronik telah membantu meningkatkan kepercayaan terhadap proses tersebut.

Dampak Penerapan Prinsip Transparansi dalam Proses Rekrutmen CPNS

Dari sisi dampak, berbagai penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berkontribusi besar terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan peserta terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat tidak hanya merasa diakomodasi haknya dalam mengikuti proses seleksi, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang menberdayakan proses pengawasan mandiri dan partisipatif.

Anysyah, T., & Bahfiarti, T. (2016) menunjukkan bahwa peserta merasa lebih puas dan percaya terhadap proses rekrutmen ketika mereka melihat bukti transparansi, seperti adanya pengumuman hasil secara terbuka setelah pelaksanaan, penggunaan teknologi terkini, serta pengawasan dari masyarakat dan media.

Pelaksanaan pengawasan yang ketat dan adanya sanksi terhadap pelanggaran juga memperkuat keyakinan terhadap keadilan proses, yang akhirnya menciptakan suasana kompetitif yang sehat. Bahkan, penerapan aturan hukuman yang tegas dan perekrutan panitia seleksi nasional telah menunjukkan bahwa proses rekrutmen tidak hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan integritas.

RELEVANSI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari seluruh hasil analisis ini, maka dapat diimplikasikan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam meningkatkan mutu proses rekrutmen CPNS. Pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan aspek

keterbukaan serta kemudahan akses informasi, bahkan harus mengintegrasikan teknologi digital secara lebih luas dan efektif.

Selain itu, aspek pelatihan kepada petugas agar mampu menyampaikan informasi secara efektif dan mengelola komunikasi secara profesional harus terus ditingkatkan. Penggunaan platform digital yang intuitif dan antarmuka yang user-friendly dapat memastikan bahwa peserta dari berbagai latar belakang mendapatkan akses informasi yang merata dan mudah dipahami.

Selanjutnya, perbaikan dalam sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan agar proses seleksi tetap objektif, adil, dan terpercaya. Rekomendasi dari berbagai studi juga menyarankan perlunya penelitian lanjutan yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi peserta dan keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam konteks rekrutmen pegawai negeri di Indonesia.

Relevansi dan implikasi kebijakan dalam penerapan prinsip transparansi dan keberlanjutan reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pelayanan publik. Seperti yang ditegaskan oleh (Mahendra dan Juliani (2022), penerapan prinsip transparansi dalam proses penerimaan CPNS dapat memperkuat akuntabilitas dan integritas birokrasi, sehingga memperkecil potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil review dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi CPNS telah menunjukkan keberhasilan dan mendapatkan apresiasi positif dari peserta dan masyarakat luas. Meski begitu, tantangan dalam hal aksesibilitas dan pemahaman informasi menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan badan kepegawaian. Diperlukan upaya berkelanjutan dan inovatif untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip good governance yang diusung benar-benar terwujud dalam seluruh aspek proses rekrutmen, guna menjamin kepercayaan masyarakat dan profesionalisme birokrasi di masa depan. Adapun poin utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Persepsi Peserta: Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen CPNS, seperti pengumuman hasil secara terbuka dan penggunaan teknologi terbaru, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan peserta terhadap proses seleksi
2. Teknologi dan Pengawasan dalam Meningkatkan Keadilan: Penggunaan teknologi seperti Computer Assisted Test (CAT) serta pengawasan dari masyarakat dan media memperkuat perasaan keadilan dan integritas dalam proses seleksi, menciptakan suasana kompetitif yang sehat serta mencegah praktik korupsi dan kecurangan
3. Peran Kebijakan dalam Meningkatkan Mutu Rekrutmen: Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai fondasi utama untuk meningkatkan mutu proses rekrutmen CPNS. Kebijakan yang mendukung aspek keterbukaan, inovasi teknologi, dan pengawasan transparan sangat penting untuk reformasi birokrasi yang efektif
4. Dampak Positif terhadap Kepercayaan Publik dan Citra Pemerintah: Keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip transparansi tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan pegawai, tetapi juga memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi merupakan investasi strategis untuk pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kepegawaian Bapak Zul Fahmi., SE., M.Pd.E. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Berkat dukungan dan masukan yang konstruktif, artikel ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik. Semoga ilmu dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Aldhy Mahendra, D., & Juliani, H. (2022). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. *Administrative Law & Governance Journal*.
- Ansyah, T., & Bahfiarti, T. (2016). Opini peserta terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui metode Computer Assisted Test (CAT) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Komunikasi*.
- Ansyah, T., & Bahfiarti, T. (2016). Opini Peserta Terhadap Tingkat Transparansi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Metode Computer Assisted Test (CAT) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Komunikasi*.
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur review: Panduan penulisan dan penyusunan.
- Dingga Aldhy Mahendra, & Henny Juliani. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. *Administrative Law & Governance Journal*
- Kim, P. S. (2007). *How to build and sustain transparency and accountability in public sector*. Yonsei University, Seoul. Jakarta: UNDESA bekerja sama dengan Kementerian PAN, UNGC, dan UNDP.
- Kusharwanti M. Disertasi (2008). Analisis Kebijakan rekrutmen dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Depok. Universitas Indonesia
- Krina Lalolo Loina, P. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic review: The experience of a PhD student. *Psychology Learning and Teaching*, 2(1), 32–35.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinaga, J. B. B. (2019). Opini peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap sistem Computer Assisted Test (CAT). *Jurnal MSDA*.
- Sedarmayanti, 2012, *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*, Bandung: Refika Aditama.
- Setyowati, E. 2009. Partisipasi Publik Dan Transparansi Dalam Rekrutmen pegawai negeri Sipil. *Jurnal Volume 03 Nomor. 02*

Suriyani, B. B., Asriani, & Elwan, L. M. (2024). Penerapan prinsip transparansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK di Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Publicuho*.

Website ; (www.menpan.go.id).

Windy, A. (2021). Penggunaan metode sistematik literatur review dalam penelitian ilmu sosiologi. *Jurnal PTK dan Pendidikan*.